

Berpotensi Berikan Pendapatan Miliaran Rupiah, BPSDMD Kalsel Diusulkan Jadi BLUD



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/05/berpotensi-berikan-pendapatan-miliaran-rupiah-bpsdmd-kalsel-diusulkan-jadi-blud>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merencanakan menjadikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel di Jalan Panglima Batur Banjarbaru menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, rencana tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Kalsel.

"Karena tidak ada pengangkatan CPNS di tahun ini jadi kemungkinan penggunaan kamar dan pelatihan bagi PNS di BPSDMD itu akan turun, tapi kita sudah menyiasatinya dengan menjadikan BPSDMD menjadi BLUD," ujarnya.

Roy mengatakan, selama ini BPSDMD Kalsel digunakan oleh ASN di pemerintah provinsi hingga kabupaten kota bahkan PNS kejaksaan. Dengan itu, potensi pendapatan BPSDMD cukup besar.

"Kita dorong BPSDMD menjadi BLUD sehingga mereka bisa meningkatkan bisnisnya dan PAD meningkat, efisiensi anggaran juga bisa dilakukan," tambahnya.

Sementara Kepala BPSDMD Kalsel, Mujiyat melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional pada BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan potensi peningkatan PAD bersumber dari BLUD BPSDMD Kalsel cukup besar.

Dari gelaran pelatihan untuk ASN setiap tahunnya pihaknya bisa mengumpulkan pendapatan sekitar Rp2 7 miliar di 2021 lalu.

"Apalagi jika jadi BLUD, kita bisa menggelar pelatihan tidak hanya untuk ASN pemerintahan, tapi juga untuk swasta dan semua potensi sarana di BPSDMD juga bisa maksimalkan untuk pendapatan," bebernya.

Terlebih BPSDMD Kalsel yang masuk dalam BPSDMD di Indonesia yang bisa menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang sudah dipercaya Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Dari Kalteng juga pelatihan di kota, bahkan nanti juga dari Sorong Papua Barat juga akan pelatihan di sini," ujarnya

Tak hanya itu, jika instansi mereka jadi BLUD, maka pihaknya bisa menerima pelatihan kapan saja.

"Kalau masih belum BLUD, pelatihan yang kita gelar harus sesuai RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Tapi kalau sudah BLUD, kita bisa menerima pelatihan ketika tahun berjalan," ucapnya.

Padahal, ada banyak pelatihan yang bisa mereka laksanakan di luar RKA. Sehingga kalau jadi BLUD, PAD yang mereka kumpulkan pasti meningkat. "Kita harus maksimalkan peluang ini," ujarnya.

Pria akrab disapa H Gia ini bahkan yakin, apabila BPSDMD jadi BLUD, setiap hari bisa menerima peserta pelatihan. "Banyak yang menjadi kewenangan selalu penyelenggara pelatihan. Misal, pelatihan kepala desa dalam rangka antisipasi korupsi dana desa. Atau yang lainnya," katanya.

Di samping bisa menggelar banyak pelatihan, dia menuturkan, jika instansinya jadi BLUD, pihaknya juga bisa mengelola anggaran sendiri.

"Kalau sekarang orang bayar, harus disetor ke kas daerah. Lalu kami meminta dana, harus ada perencanaan dulu," katanya.

Meski mengelola anggaran sendiri, pihaknya masih harus membuat laporan keuangan untuk pertanggungjawaban ke gubernur dan DPRD Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/05/berpotensi-berikan-pendapatan-miliaran-rupiah-bpsdmd-kalsel-diusulkan-jadi-blud>, 5 Agustus 2022.
2. <https://apahabar.com/2022/08/kejar-pad-bpsdmd-kalsel-didorong-harus-jadi-blud/>, 5 Agustus 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)